

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang dinamis dan responsif terhadap perubahan kebutuhan serta kebijakan.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilatarbelakangi oleh adanya penyesuaian prioritas pembangunan daerah, evaluasi atas pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, serta perubahan pagu anggaran dalam APBD Perubahan Tahun 2025. Dokumen ini disusun untuk menyempurnakan Renja DPMD Tahun 2025 yang telah ada, sehingga arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, terutama Sekretaris Dinas, Kasubbag Perencanaan, dan para Kepala Bidang beserta jajarannya, atas dedikasi dan kerjasamanya dalam menyusun dokumen ini. Semoga Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman yang kokoh dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, serta mampu mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong di tahun 2025.

Tanjung, 01 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tabalong,



ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.I.P.
NIP. 19780910 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Perubahan Renja	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Belanja s.d Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	9
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong s/d Maret 2025 dan	
Tabel 2.3 Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025	10
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong	19
Tabel 3.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	29
Tabel 3.2 Perubahan Pagu Anggarn Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan suatu Perangkat Daerah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sebagai dokumen yang dinamis, Renja dapat mengalami perubahan untuk merespons dinamika internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tabalong sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Mengingat pentingnya peran desa sebagai ujung tombak pembangunan, DPMD dituntut untuk terus menyelaraskan program dan kegiatannya dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah yang selalu berkembang.

Perubahan Renja DPMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama, antara lain:

1. Penyesuaian Prioritas Pembangunan Daerah: Terdapat perubahan fokus dan prioritas pembangunan di Kabupaten Tabalong yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan DPMD agar tetap selaras dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2025.
2. Optimalisasi Anggaran: Berdasarkan hasil review dan penyesuaian dalam dokumen Rencana Kerja Perubahan (SIPD), terjadi penyesuaian pagu indikatif program yang cukup signifikan. Perubahan ini mencerminkan adanya realokasi dana antar program dan sub kegiatan sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penguatan prioritas pembangunan. Penataan ulang dokumen perencanaan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan

anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, dengan mengalokasikan sumber daya pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penguatan kapasitas pemerintahan desa.

3. Evaluasi Kinerja dan Isu Strategis: Hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahunan sebelumnya mengidentifikasi beberapa capaian yang belum optimal dan isu-isu strategis baru yang perlu direspon, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, optimalisasi Dana Desa, dan penguatan BUMDes. Renja Perubahan ini menjadi sarana untuk merumuskan strategi baru dalam menjawab tantangan tersebut.
4. Dinamika Kebijakan Nasional: Adanya perubahan regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat terkait dana desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat yang memerlukan penyesuaian di tingkat daerah.
5. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dokumen Renja DPMD Tahun 2025 menjadi lebih responsif, akuntabel, dan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Tabalong menuju desa mandiri.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Negara 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 18. 19. 20. 21. Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 03], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 4);
23. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong;
25. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah:

- a. Menyempurnakan Dokumen Renja: Menyesuaikan dokumen Renja DPMD Tahun 2025 dengan perkembangan kebijakan, kondisi terkini, dan hasil evaluasi kinerja, sehingga menjadi dokumen perencanaan yang lebih akurat dan operasional.
- b. Memastikan Keselarasan: Menjaga keselarasan antara program dan

kegiatan DPMD dengan RKPD Perubahan Tahun 2025, Renstra DPMD, serta kebijakan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- c. Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran: Menyediakan kerangka pendanaan yang jelas dan terukur sesuai dengan pagu APBD Perubahan Tahun 2025, sehingga alokasi sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah:

- a. Memberikan arahan operasional yang terbaru dan terarah bagi seluruh jajaran DPMD dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025.
- b. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kebutuhan spesifik masyarakat desa, terutama kelompok rentan dan perempuan.
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMD melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang perubahan Renja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

Memuat evaluasi atas kinerja DPMD pada tahun-tahun sebelumnya, analisis

kinerja pelayanan, identifikasi isu-isu strategis, review terhadap RKPD, dan penelaahan usulan program dari masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan rencana kerja dan pendanaan yang telah diperbaharui, termasuk perbandingan pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan serta prakiraan maju tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan harapan atas implementasi Renja Perubahan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 telah berjalan selama Triwulan I (Januari – Maret 2025). Evaluasi pada periode awal tahun ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi capaian awal, kendala yang muncul, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk perbaikan di triwulan berikutnya. Hasil evaluasi ini juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berikut adalah rincian anggaran dan realisasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Belanja s.d Triwulan I Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
5	BELANJA DAERAH	18.646.123.421	1.841.375.614	9.88
5.1	BELANJA OPERASI	18.488.624.313	1.841.375.614	9.96
5.1.01	Belanja Pegawai	6.183.107.000	1.079.069.127	17.45
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.305.517.313	762.306.487	6.19
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.488.624.313	1.841.375.614	9.96
5.2	BELANJA MODAL	157.499.108	0	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.499.108	0	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	157.499.108	0	0.00

Adapun realisasi pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong s/d Maret 2025 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan /Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	
									Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2025 s.d TW 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(10/4)
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Nilai IKM 2. Nilai Lakip	A A	B BB	B BB			B BB	B BB	B BB
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	50 Dokumen	10 Dokumen	3 Dokumen	30%	10 Dokumen	53 Dokumen	30%
2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	11 Dokumen	50%
2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kienrja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kienrja SKPD	8 Laporan	40 Laporan	8 Laporan	2 Laporan	25%	8 Laporan	42 Dokumen	25%
2	13	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistk Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistk Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen		
2	13	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup perangkat daearh	68 Data	68 Data	68 Data			68 Data		

2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	130 Dokumen	26 Dokumen	6 Dokumen	23%	26 Dokumen	136 Dokumen	23%
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	21 Orang	21 Orang	21 Orang	100%	21 Orang	21 Orang	100%
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	1 Paket			1 Paket	5 Paket	
2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 Paket	150 Paket	46 Paket			46 Paket	150 Paket	
2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengganddand	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5 Paket	1 Paket			1 Paket	5 Paket	
2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	20 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	4 Dokumen	21 Dokumen	25%
2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	250 Laporan	50 Laporan	10 Laporan	20%	50 Laporan	260 Laporan	20%
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25%	4 Laporan	21 Laporan	25%
2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan	4 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	25%	4 Laporan	21 Laporan	25%
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit	26 Unit

2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit
2	13	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	1 Unit			1 Unit	2 Unit	
2	13	02			Program Penataan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	121 Desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa	121 Desa
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	10 Unit	2 Unit			2 Unit	10	
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	03	2.01		Fasilitasi kerjasama desa	Persentase Desa yang difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja sama Desa	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	2 Dokumen	
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	2 Dokumen	
2	13	04			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	121 Dokumen	605 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	100%	121 Dokumen	726 Dokumen	100%

2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembangunan Desa	121 Dokumen	605 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	100%	121 Dokumen	726 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	121 Dokumen	605 Dokumen	121 Dokumen	121 Dokumen	100%	121 Dokumen	726 Dokumen	100%
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	242 Orang	242 Orang	242 Orang			242 Orang	242 Orang	
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	80 Dokumen	70 Dokumen	80 Dokumen			80 Dokumen	70 Dokumen	
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	
2	13	05			Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Tinggi Kelembagaan Kemasyarakatan Desa yang aktif	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100%	Tinggi	Tinggi	100%
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase PKK Aktif 2. Persentase BUM Desa yang aktif 3. Persentase Posyandu Aktif 4. Persentase LPM Aktif 5. Jumlah PosyanteK yang terbentuk	1. 100% 2. 41% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK	1. 100% 2. 28% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK	1. 10% 2. 41% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK	1. 100% 2. 28% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK	1. 100% 2. 28% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK	1. 100% 2. 41% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK	1. 100% 2. 28% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK	1. 100% 2. 28% 3. 100% 4. 100% 5. 64 PosyanteK
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	5 Dokumen	

2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga			3 Lembaga	3 Lembaga	
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen			1 Dokumen	5 Dokumen	
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat guna	1 Laporan	5 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	5 Laporan	

Berdasarkan data pada tabel 2.1 tersebut, dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah merealisasikan anggaran sebesar Rp.1.841.375.614,00 atau sekitar 9,88 % dari total anggaran untuk tahun 2025. Pencapaian realisasi anggaran triwulan I relatif masih rendah dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan karena pelaksanaannya memang dijadwalkan pada triwulan II, III dan IV.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja adalah gambaran keadaan fisik tempat kerja, gambaran SDM organisasi dan gambaran hasil dari semua pekerjaan SDM organisasi. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Tergolong sebagai pelayanan langsung adalah pelayanan konsultasi dan pembinaan lapangan. Sedangkan pelayanan tidak langsung adalah monitoring penyusunan dan regulasi dalam rangka menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi desa-desa di Kabupaten Tabalong berkembang sehingga bisa mencapai kemandirian.

Terkait dengan jumlah kelompok binaan pemberdayaan masyarakat terdapat banyak kelompok binaan yang belum dibina langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa seperti Rukun Tetangga/ Rukun Warga, Karang Taruna, Kelompok Tani, Kelompok Seni dan Budaya, Kelompok Perlindungan Masyarakat Desa dan lain sebagainya, sehingga kelompok LPM ini seperti mau hilang. Keadaan ini sangat tidak diharapkan. Mengingat pentingnya peran KSM dan PSM dalam masyarakat maka ada baiknya dilakukan revitalisasi peran LPM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di desa dipandang perlu melakukan revitalisasi peran mereka.

Mengingat pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjembatani berbagai tugas pemberdayaan masyarakat dan desa maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut melakukan reposisioning peran, tugas dan tanggung jawab masyarakat melalui revitalisasi penataan kelembagaan, pengawasan dan pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan desa, penguatan lembaga usaha ekonomi rakyat, dan pembinaan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi pemerintahan di desa.

Terkait dengan tingkat keberdayaan tidak bisa dikatakan sebagai gambaran keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. Karena 42 komponen indikator IDM merupakan kinerja seluruh pemangku kepentingan terkait, di antaranya adalah pendidikan, kesehatan, koperasi, perbankan, pertanian, kepolisian, kejaksaan dan lain-lain. Jadi tidaklah mengherankan jika untuk meningkatkan keberdayaan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sebagai konsekuensi dari rencana perubahan SOTK di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Penggabungan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa maka diusulkan juga numenklatur Program dan Kegiatan disesuaikan dengan numenklatur fungsi teknis agar kinerja pelaku kinerja dapat terukur dan tujuan tersusunnya perencanaan yang SMART dapat terwujud.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	IKK	Target Renstra						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	✓	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,80	0,67	0,68	0,69	0,78	0,79	0,80	
2	Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan	✓		Maju	Maju	Mandiri	Mandiri	Berdaya saing		Maju	Maju	Mandiri	Mandiri	Berdaya saing	
3	Nilai IKM	✓	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4	Nilai SAKIP	✓	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
5	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Tingkat Kelembagaan Kemasyarakatan Desa yang aktif	✓	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
8	Persentase PKK aktif	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Posyandu aktif	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase LPM aktif	✓	100	100	100	100	100		100	100			100	100	
11	Jumlah Posyantek yang terbentuk	✓	58	59	60	61	62	63	58	59	60	61	62	63	
12	Persentase BUMDesa aktif	✓	36	38	39	40	41	42	36	38	39	40	41	42	

13	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Aparatur desa dan anggota BPD yang meningkat kapasitasnya	✓	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu- isu penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur desa dan sumberdaya aparatur pembina di Kecamatan dan di Kabupaten.
2. Masih kurangnya Sumber daya yang dimiliki DPMD dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
3. Sumberdaya aparatur kecamatan yang kurang berfungsi secara optimal.
4. Sumberdaya Aparatur Desa dilihat dari sisi kuantitas dan kualitas masih terbatas untuk bisa lebih berkembang, maju dan mandiri.
5. Pendamping teknis dan pendamping administrasi bagi desa tersedia di Kecamatan-Kecamatan kurang dimanfaatkan desa (Pemerintah Desa).
6. Tingkat inovasi yang masih rendah dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan.
7. Regulasi untuk desa agak kompleks dan tumpang tindih antara peraturan yang dibuat Kemendagri dan Kemendesa.
8. Tata batas desa belum selesai semua.

Berdasarkan permasalahan diatas isu-isu penting berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong antara lain adalah:

1. Tata batas desa, kewenangan desa dan kemandirian desa.
2. Efektifitas pemanfaatan dana desa dalam kerangka pencapaian program nawacita menuju sustainable development goals desa.
3. Kecenderungan SKPD/KL melirik dan menggunakan dana desa untuk mencapai kinerjanya.

4. Tata kelola pemerintahan desa yang baik.
5. Tingkat keberdayaan dan ketahanan masyarakat desa masih rendah dalam hal social, ekonomi dan ekologi (seperti eksistensi BUMDes dan LKD).
6. Komptensi aparat pembina desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan sebagaimana disebutkan dalam RKPD Tahun 2025 adalah “Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Tabalong yang Sejahtera Dinamis, Maju dan Berkelanjutan” dengan 5 prioritas daerah dan sasaran pembangunan yang upaya pencapaiannya dijabarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Adapun 5 (lima) prioritas daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan, pelayanan Kesehatan untuk penurunan stunting untuk pencapaian kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN;
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal; dan
5. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

RKPD Tahun 2025 dalam hal ini mengalami perubahan diantaranya dari segi rumusan kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Perubahan RKPD menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, maka dalam reviu ini akan dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Perubahan Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASION AL		DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.0.00.0. 00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							18.974.204.219,00	18.646.123.481,00	30.940.982.507,00	11.966.778.288,00							20.050.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.974.204.219,00	18.646.123.481,00	30.940.982.507,00	11.966.778.288,00							20.050.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							18.974.204.219,00	18.646.123.481,00	30.940.982.507,00	11.966.778.288,00							20.050.000.000,00	
1 .	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip				-	BB Huruf	6.764.355.998,00	8.004.691.758,00	8.233.003.372,00	1.468.647.374,00							6.400.000.000,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Dinas PMD				-	100 %	33.583.209,00	33.583.209,00	0,00	-33.583.209,00							50.000.000,00	
	2.13.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.983.136,00	6.983.136,00	0,00	-6.983.136,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	7 Laporan	6.600.073,00	6.600.073,00	0,00	-6.600.073,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1 Data	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik untuk mendukung pencapaian indeks reformasi birokrasi yang maksimal			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas PMD				-	21 Orang	4.928.875.000,00	6.224.267.000,00	6.389.267.000,00	1.460.392.000,00							4.500.000.000,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	4.928.875.000,00	6.224.267.000,00	6.389.267.000,00	1.460.392.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum				-	100 %	807.816.077,00	715.921.093,00	778.787.916,00	-29.028.161,00							590.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	26.327.310,00	26.327.310,00	26.353.060,00	25.750,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Paket	46 Paket	305.947.597,00	328.477.573,00	302.127.934,00	-3.819.663,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	13.393.210,00	13.393.210,00	13.393.210,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.516.960,00	12.516.000,00	12.516.000,00	-960,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	449.631.000,00	335.207.000,00	424.397.712,00	-25.233.288,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				-	100 %	522.354.912,00	559.193.656,00	593.221.656,00	70.866.744,00							600.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	70.200.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	452.154.912,00	488.993.656,00	523.021.656,00	70.866.744,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah				-	100 %	471.726.800,00	471.726.800,00	471.726.800,00	0,00							660.000.000,00	

	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	27 Unit	328.108.800,00	328.108.800,00	328.108.800,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	23 Unit	14.870.000,00	14.870.000,00	14.870.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	128.748.000,00	128.748.000,00	128.748.000,00	0,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik				-	100 %	6.125.942.753,00	5.984.938.127,00	17.913.101.797,00	11.787.159.044,00							7.250.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Terfasilitasinya Desa dalam Penyelenggaraan Penataan Desa				-	100 %	6.125.942.753,00	5.984.938.127,00	17.913.101.797,00	11.787.159.044,00							7.250.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				121 Desa	121 Desa	214.373.966,00	174.309.200,00	146.054.200,00	-68.319.766,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				2 Unit	6 Unit	5.911.568.787,00	5.810.628.927,00	17.767.047.597,00	11.855.478.810,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur dasar untuk mendukung IKN			7.000.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

3	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan				-	100 %	295.897.513,00	150.249.277,00	227.122.695,00	-68.774.818,00							350.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa				-	100 %	295.897.513,00	150.249.277,00	227.122.695,00	-68.774.818,00							350.000.000,00	
	2.13.03.2.01. 0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	98.581.466,00	48.380.230,00	156.254.130,00	57.672.664,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.03.2.01. 0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	2 Dokumen	197.316.047,00	101.869.047,00	70.868.565,00	-126.447.482,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang baik				-	100 %	3.639.286.923,00	2.764.494.094,00	2.776.832.024,00	-862.454.899,00							3.600.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan kepada Aparatur Pemerintahan Desa dan BPD				-	100 %	3.639.286.923,00	2.764.494.094,00	2.776.832.024,00	-862.454.899,00							3.600.000.000,00	
	2.13.04.2.01. 0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	1.748.966.305,00	1.664.999.305,00	1.810.785.785,00	61.819.480,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			2.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	176.517.613,00	109.334.613,00	56.334.613,00	-120.183.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				121 Dokumen	121 Dokumen	202.450.888,00	234.303.888,00	193.303.888,00	-9.147.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				242 Orang	242 Orang	630.641.812,00	376.164.812,00	376.160.812,00	-254.481.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				57 Laporan	57 Laporan	362.464.829,00	0,00	0,00	-362.464.829,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				80 Dokumen	80 Dokumen	85.210.637,00	80.570.637,00	72.390.637,00	-12.820.000,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	433.034.839,00	299.120.839,00	267.856.289,00	-165.178.550,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif				-	100 %	2.148.721.032,00	1.741.750.225,00	1.790.922.619,00	-357.798.413,00							2.450.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa				-	100 %	2.148.721.032,00	1.741.750.225,00	1.790.922.619,00	-357.798.413,00							2.450.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</i>				1 Dokumen	4 Dokumen	1.039.303.239,00	813.691.411,00	1.078.237.411,00	38.934.172,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				1 Lembaga	6 Lembaga	221.144.619,00	144.863.324,00	101.826.324,00	-119.318.295,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	519.766.960,00	466.786.811,00	435.874.811,00	-83.892.149,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	<i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>				1 Laporan	20 Laporan	368.506.214,00	316.408.679,00	174.984.073,00	-193.522.141,00	Kab. Tabalong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha, menurunkan kemiskinan dan angka pengangguran untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	J U M L A H								18.974.204.219,00	18.646.123.481,00	30.940.982.507,00	11.966.778.288,00							20.050.000.000,00	

Berdasarkan revidi dan analisa terhadap tabel diatas, beberapa kendala utama yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja di Triwulan I dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketergantungan pada Program Fisik yang Dikerjakan Pihak Ketiga: Kegiatan TMMD dan Karya Bakti TNI yang melibatkan kolaborasi dengan Kodim 1008 Tabalong memiliki tahapan pengerjaan yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Proses penyelesaian pekerjaan fisik di lapangan menjadi faktor penentu utama realisasi pembayaran, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran baru dapat terjadi secara signifikan setelah pekerjaan fisik rampung.
2. Siklus Anggaran dan Tahapan Kegiatan: Triwulan I secara umum seringkali merupakan periode persiapan dan koordinasi, sehingga realisasi keuangan dan fisik masih berada pada tahap awal.
3. Kondisi Lapangan yang Dinamis: Pelaksanaan program fisik di desa-desa seringkali menghadapi tantangan seperti cuaca, aksesibilitas lokasi, dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa, yang dapat mempengaruhi kecepatan penyelesaian proyek.

Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong telah merumuskan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Percepatan Penyelesaian Program Fisik: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan terus mengawal dan mendorong percepatan penyelesaian program TMMD dan Karya Bakti TNI yang ditargetkan selesai pada bulan Juni 2025. Hal ini untuk memastikan pembayaran dapat segera direalisasikan dan serapan anggaran meningkat.
2. Peningkatan Koordinasi: Memperkuat koordinasi dengan Kodim 1008 Tabalong dan pihak terkait lainnya untuk mengantisipasi hambatan dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
3. Pengajuan Anggaran Perubahan: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah mengusulkan penambahan tiga titik Karya Bakti TNI pada APBD

Perubahan Tahun 2025 dengan total anggaran sekitar Rp9 miliar.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap seluruh program dan kegiatan, tidak hanya yang bersifat fisik, untuk memastikan target kinerja dapat tercapai sesuai dengan rencana.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan prioritas pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong telah ditetapkan program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada perubahan tahun melalui 5 (lima) program 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
No.	URAIAN	No.	URAIAN	No.	URAIAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				3.	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				4.	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.	PROGRAM PENATAAN DESA	5.	Penyelenggaraan Penataan Desa	16.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa
				17.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	6.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	18.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
				19.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	7.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	20.	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
				21.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
				22.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
				23.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
				24.	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
				25.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				27.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
				28.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
				29.	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun total pagu indikatif untuk Tahun 2025 pada APBD Perubahan adalah sebesar Rp31.060.982.507,00 yang terdiri dari berbagai sumber dana seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Rincian perubahan pagu per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perubahan Pagu Anggar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN					KETERANGAN
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	1. Nilai IKM 2. Nilai Lakip	1. B 2. BB	8.004.691.758	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	1. Nilai IKM 2. Nilai Lakip	1. B 2. BB	8.233.003.372	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Dokumen	33.583.209	Perencanaan, Penganggaran, dan Eavaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Tersusnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	10 Dokumen	0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	6.983.136	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Laporan	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	6.600.073	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	0	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0	

	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DPMD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	10.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	DPMD	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	6.224.267.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	26 Dokumen	6.389.267.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	6.224.267.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang	6.389.267.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	715.921.093	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	778.787.916	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.327.310	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.353.060	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	328.477.573	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	302.127.934	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.393.210	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.393.210	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12.516.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DPMD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	12.516.000	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	335.207.000	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	424.397.712	

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	559.193.656	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	593.221.656	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	70.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	70.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	488.993.656	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	523.021.656	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	471.726.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	471.726.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	33 Unit	328.108.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanya	33 Unit	328.108.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.870.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.870.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	128.748.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	128.748.000	
	Program Penataan Desa	DPMD	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	100%	5.984.938.127	Program Penataan Desa	DPMD	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik	100%	17.913.101.797	

	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	DPMD	Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	5.984.938.127	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	DPMD	Persentase Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	100%	17.913.101.797	
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	121 Desa	174.309.200	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	DPMD	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	121 Desa	146.054.200	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	5.810.628.927	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	DPMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	2 Unit	17.767.047.597	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan	100%	150.249.277	Program Peningkatan Kerjasama Desa	DPMD	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan	100%	227.122.695	
	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	DPMD	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	100%	150.249.277	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	DPMD	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	100%	227.122.695	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	48.380.230	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	156.254.130	
	Fasilitasi Kerja sama Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	1 Dokumen	101.869.047	Fasilitasi Kerja sama Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kab/Kota	1 Dokumen	70.868.565	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	100%	2.764.494.094	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan yang Baik	100%	2.776.832.024	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	DPMD	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Meningkatkan	100%	2.764.494.094	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan	DPMD	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang Meningkatkan	100%	2.776.832.024	

	Administrasi Desa		Kapasitasnya			Administrasi Desa		Kapasitasnya			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	121 Dokumen	1.664.999.305	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	121 Dokumen	1.810.785.785	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembangunan Desa	121 Dokumen	109.334.613	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembangunan Desa	121 Dokumen	56.334.613	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	121 Dokumen	234.303.888	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	121 Dokumen	193.303.888	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	242 Orang	376.164.812	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	242 Orang	376.160.812	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Profil Desa	80 Dokumen	80.570.637	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Profil Desa	80 Dokumen	72.390.637	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Desa	299.120.839	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	267.856.289	

	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Tingkat Kelembagaan Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Tinggi	1.741.750.225	Program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Tingkat Kelembagaan Kemasyarakatan Desa yang Aktif	Tinggi	1.910.922.619	
	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD	1. Persentase PKK Aktif 2. Persentase Posyandu Aktif 3. Persentase LPM Aktif 4. Jumlah Posyantek yang Terbentuk 5. Persentase BUMDesa Aktif	1. 100% 2. 100% 3. 1005% 4. 64 Posyantek 5. 41%	1.741.750.225	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD	1. Persentase PKK Aktif 2. Persentase Posyandu Aktif 3. Persentase LPM Aktif 4. Jumlah Posyantek yang Terbentuk 5. Persentase BUMDesa Aktif	1. 100% 2. 100% 3. 1005% 4. 64 Posyantek 5. 41%	1.910.922.619	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	813.691.411	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW/PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.198.237.411	

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Lembaga	144.863.324	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Lembaga	101.826.324	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	466.786.811	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	435.874.811	
	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	1 Laporan	316.408.679	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi tepat Guna	1 Laporan	174.984.073	
TOTAL					18.646.123.481	TOTAL					31.060.982.507

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang dinamis dan adaptif, yang disusun sebagai respons terhadap perubahan kebijakan, kondisi, dan anggaran.

Berdasarkan seluruh analisis dan perumusan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPMD Kabupaten Tabalong melalui 5 (lima) program utama, 8 (delapan) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Melalui program penunjang, DPMD memastikan pelayanan internal yang profesional dan akuntabel.
2. Memperkuat Pemerintahan Desa: Melalui program penataan dan administrasi pemerintahan desa, DPMD berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
3. Mewujudkan Kemandirian Desa: Melalui program pemberdayaan masyarakat dan kerjasama desa, DPMD mendorong masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih mandiri, inovatif, dan kolaboratif dalam membangun desa.

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 antara lain:

1. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong, khususnya dalam peningkatan keberdayaan masyarakat desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, dan percepatan pencapaian status desa mandiri.
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas PMD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas PMD Kabupaten Tabalong Periode 2025–2026, yang difokuskan untuk mencapai target kinerja jangka menengah secara bertahap, terutama dalam peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) dan kualitas pelayanan publik.
3. Perubahan Renja ini juga mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025, guna menjaga keselarasan dan konsistensi antar dokumen

perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung lima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tabalong.

4. Dalam perumusan kegiatan dan sub kegiatan, juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta dinamika kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa pada tahun berjalan, termasuk penyesuaian program Karya Bakti TNI dan optimalisasi Dana Desa.
5. Perubahan Renja ini mengakomodasi kebijakan nasional terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, termasuk pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Desa serta Nawacita "Membangun Indonesia dari Pinggiran".

Adapun Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Renja ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas PMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025.
2. Dalam penyusunan RKPA, dimungkinkan terjadi penyesuaian berdasarkan hasil review oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong, serta perubahan pada saat pembahasan DPA berdasarkan hasil asistensi dan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Tabalong.
3. Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian kinerja, dengan memprioritaskan program-program yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Renja, meliputi koordinasi dengan kecamatan, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa (LKD), serta instansi vertikal terkait seperti Kodim 1008 Tabalong dalam pelaksanaan program fisik.
5. Setiap pelaksanaan kegiatan wajib memperhatikan aspek responsif gender dan keberpihakan kepada kelompok rentan di perdesaan, sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.

Untuk rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2025 secara berkala setiap triwulan, guna memastikan ketercapaian target dan melakukan langkah korektif bila diperlukan. Evaluasi ini mencakup capaian fisik dan keuangan, khususnya pada program-program infrastruktur desa.
2. Menjamin kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam bidang peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penguatan kelembagaan ekonomi desa (BUMDesa), peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan (PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), serta fasilitasi sarana dan prasarana desa.
3. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar bidang di lingkungan Dinas PMD, serta dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, TNI (melalui program TMMD dan Karya Bakti TNI), dunia usaha, dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka percepatan pembangunan desa.
4. Melakukan monitoring terhadap penggunaan Dana Desa di 121 desa di Kabupaten Tabalong untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang telah direncanakan.
5. Menyusun laporan kinerja secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja, yang akan disampaikan kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah dan DPRD Kabupaten Tabalong.
6. Mempersiapkan dokumen perencanaan tahun berikutnya (Renja Tahun 2026) berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, dengan mempertimbangkan capaian, kendala, dan perubahan kebutuhan pembangunan di tingkat desa

Efektivitas implementasi Renja Perubahan ini sangat bergantung pada kerja keras, integritas, dan sinergi seluruh stakeholders terkait, baik di tingkat kabupaten,

kecamatan, hingga desa. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh elemen memiliki pedoman yang jelas dan terukur, sehingga target-target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Akhirnya, semoga upaya kita bersama dalam membangun desa dan memberdayakan masyarakat dapat membawa Kabupaten Tabalong menuju masa depan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman yang jelas, terukur, dan akuntabel bagi seluruh jajaran DPMD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dengan kerja sama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, kami optimis bahwa pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Tabalong akan terus mengalami kemajuan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhoi dan memberkahi setiap upaya yang kita laksanakan bersama dalam membangun Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri.

Tanjung, 01 Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Tabalong,



ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP, M.I.P.
NIP. 19780910 199711 1 001